



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-09 TAHUN 2026

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 April 2026;
 2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna tanggal 30 April 2026;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 30 April 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 April 2026
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN TERSEBUT SECARA OPTIMAL, PANITIA KHUSUS I DPRD PROVINSI BANTEN SETELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2025, MENYAMPAIKAN SEJUMLAH REKOMENDASI STRATEGIS KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

REKOMENDASI TERSEBUT DISAMPAIKAN SEBAGAI MASUKAN KONSTRUKTIF DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA MENDORONG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN.

REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ, BAIK PADA TAHUN BERJALAN MAUPUN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, AGAR DITINDAKLANJUTI SECARA SERIUS DAN MENJADI BAGIAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, SERTA KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH, SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT, PANSUS I DPRD MERUMUSKAN SEJUMLAH ISU STRATEGIS YANG MENJADI PERHATIAN BERSAMA, YANG SELANJUTNYA DISERTAI DENGAN REKOMENDASI DPRD SEBAGAI BERIKUT:

1. ISU KESEHATAN

- a. DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SECARA MENYELURUH, DIPERLUKAN PENGUATAN LAYANAN KESEHATAN JIWA MELALUI KAJIAN PENGEMBANGAN FASILITAS KHUSUS, TERMASUK PENYEDIAAN TENAGA MEDIS DAN SISTEM RUJUKAN YANG TERINTEGRASI, SEHINGGA KEBUTUHAN PELAYANAN

KESEHATAN JIWA DAPAT TERPENUHI SECARA MEMADAI DAN MANUSIAWI.

- b. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN, MELALUI PENINGKATAN KEGIATAN PENANGANAN STUNTING YANG TEPAT SASARAN DENGAN MONITORING BERKALA DAN BERKOLABORASI DENGAN BKKBN SERTA MENGEVALUASI KINERJA TERKAIT DENGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SEHINGGA TIDAK ADA LAGI TERJADI PENAMBAHAN STUNTING.
- c. SELURUH MASYARAKAT RENTAN YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK DESIL 1 SAMPAI DENGAN DESIL 5 MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN, MELALUI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN (JKN) BERKOLABORASI DENGAN BPJS KESEHATAN ANTARA LAIN PARA PANYANDANG DISABILITAS, WARGA LANJUT USIA DAN MASYARAKAT TERLANTAR. DAN PENGUATAN SINERGI PEMBIAYAAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBAYARAN IURAN JKN.
- d. DIPERLUKAN PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MELALUI PENGUATAN KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, TENAGA MEDIS, SERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN.

2. ISU PENDIDIKAN

- a. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR SERTA MASIH ADANYA KESENJANGAN KUALITAS PENDIDIKAN ANTARWILAYAH, DIPERLUKAN PENGUATAN PROGRAM YANG BERORIENTASI MITRA INDUSTRI YANG DIKENAL DENGAN KOLABORASI LINK AND MATCH DENGAN DUNIA INDUSTRI MELALUI PENYELARASAN KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN KOMPETENSI ANTARA LEMBAGA VOKASI (SMK/POLITEKNIK) DENGAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DU/DI), PENGUATAN PENGEMBANGAN MODEL KERJA SAMA PENDIDIKAN VOKASI DENGAN DUNIA INDUSTRI SECARA TERSTRUKTUR DAN BERKELANJUTAN ADALAH UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN YANG SIAP KERJA.
- b. DIPERLUKAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, KHUSUSNYA PADA WILAYAH DENGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA

SEKOLAH YANG MASIH RENDAH, SERTA PENGUATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN LAYANAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN, TERMASUK PEMBERIAN PERHATIAN DAN FASILITASI TERHADAP SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN, SELARAS DENGAN KEBIJAKAN DAERAH TERKAIT FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEAGAMAAN, SERTA PENGUATAN INTERVENSI BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU MELALUI PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN ALTERNATIF, TERMASUK PROGRAM SEKOLAH RAKYAT, YANG DILAKSANAKAN SECARA SINERGIS DAN TERINTEGRASI DENGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL MAUPUN DAERAH, GUNA MEMPERLUAS AKSES PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN.

- c. DIPERLUKAN PENGUATAN PROGRAM PENCEGAHAN PUTUS SEKOLAH MELALUI INTERVENSI BERBASIS DATA, PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI KELOMPOK RENTAN, SERTA KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA GUNA MEMASTIKAN TIDAK TERJADI PENINGKATAN ANGKA PUTUS SEKOLAH.
- d. DIPERLUKAN OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PENEMPATAN KERJA LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI MELALUI KERJA SAMA DENGAN PELAKU USAHA, PENYELENGGARAAN JOB FAIR SECARA BERKALA, SERTA PENGUATAN SISTEM INFORMASI PASAR KERJA DAERAH.
- e. DIPERLUKAN PENGUATAN SISTEM PERENCANAAN, MONITORING, DAN EVALUASI BERBASIS DATA YANG TERINTEGRASI UNTUK MEMASTIKAN PENINGKATAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAPAT TERCAPAI SECARA LEBIH MERATA DAN BERKELANJUTAN.

3. ISU INFRASTRUKTUR JALAN

- a. MEMPERHATIKAN BELUM OPTIMALNYA REALISASI BELANJA MODAL YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMBANGUNAN FISIK, DIPERLUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN MELALUI PEMELIHARAAN RUTIN, PENINGKATAN STRUKTUR JALAN, SERTA PELEBARAN RUAS STRATEGIS GUNA MENDUKUNG KONEKTIVITAS WILAYAH DAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN.
- b. DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN KEGIATAN BERSKALA NASIONAL (PON), DIPERLUKAN UPAYA PERCEPATAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN PADA KORIDOR STRATEGIS MELALUI PELEBARAN

DAN PENATAAN MANAJEMEN LALU LINTAS, SEHINGGA PERGERAKAN ORANG DAN BARANG DAPAT BERLANGSUNG AMAN DAN EFISIEN. DISAMPING ITU PERLU DILAKUKAN PERENCANAAN DISELURUH OPD UNTUK Mendukung kelancaran dan suksesnya kegiatan berskala nasional dimaksud.

- c. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MELALUI PROGRAM BANG ANDRA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERLU MEMPERHATIKAN DAN DIIMBANGI DENGAN PEMBANGUNAN JALAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI, MELALUI PENGUATAN KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA AGAR KONEKTIVITAS WILAYAH DAN PEREKONOMIAN DESA DAPAT BERKEMBANG SECARA OPTIMAL.
- d. DALAM RANGKA MEMPERLANCAR AKTIVITAS MASYARAKAT DI WILAYAH PADAT SEPERTI KABUPATEN TANGERANG UTARA, DIPERLUKAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN PADA RUAS TELUK NAGA – DADAP GUNA Mendukung KONEKTIVITAS DAN MOBILITAS MASYARAKAT.
- e. UNTUK MENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN, DIPERLUKAN KEPASTIAN KELANJUTAN PELEBARAN JALAN PALIMA – CINANGKA KHUSUSNYA PADA RUAS CINANGKA-PS. TENENG YANG BERPOTENSI MEMBAHAYAKAN PENGENDARA DAN MASYARAKAT SEKITAR.

4. ISU KAWASAN KUMUH & PERMUKIMAN

DENGAN TINGGINYA TEKANAN PERMUKIMAN PADA WILAYAH PADAT, DIPERLUKAN PENGUATAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH MELALUI SINERGI LINTAS PEMERINTAH DAERAH, BERBASIS DATA YANG AKURAT, SERTA PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL.

5. ISU PENATAAN RUANG JALAN

DIPERLUKAN PENGUATAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG JALAN MELALUI KOORDINASI YANG LEBIH EFEKTIF ANTARA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA, TERMASUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS PERHUBUNGAN, DISERTAI DENGAN PENYEDIAAN ALTERNATIF RUANG PARKIR DAN PENATAAN ULANG LOKASI USAHA MASYARAKAT, SEHINGGA FUNGSI JALAN SEBAGAI SARANA TRANSPORTASI DAPAT BERJALAN OPTIMAL TANPA

MENGABAIKAN ASPEK SOSIAL DAN KEBERLANGSUNGAN AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT.

6. ISU KETENAGAKERJAAN

- a. DENGAN BESARNYA JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF, DIPERLUKAN KEBIJAKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA YANG LEBIH TERARAH MELALUI PENGUATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI, PENGEMBANGAN SEKTOR PRODUKTIF, SERTA FASILITASI PENEMPATAN KERJA, SEHINGGA POTENSI BONUS DEMOGRAFI DAPAT DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL.
- b. DIPERLUKAN PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINK AND MATCH ANTARA PENDIDIKAN VOKASI DAN DUNIA INDUSTRI MELALUI PENYELARASAN KURIKULUM, PENINGKATAN PROGRAM MAGANG, SERTA KEMITRAAN STRATEGIS DENGAN PELAKU USAHA, SEHINGGA LULUSAN MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PASAR KERJA.
- c. DENGAN TINGGINYA INVESTASI YANG MASUK, DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG MEMASTIKAN PRIORITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL MELALUI PENGUATAN REGULASI DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI, SEHINGGA MANFAAT EKONOMI INVESTASI DAPAT DIRASAKAN SECARA LEBIH LUAS OLEH MASYARAKAT, SERTA DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH.
- d. DIPERLUKAN PENGUATAN SISTEM REKRUTMEN TENAGA KERJA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI DIGITALISASI PROSES, PENGAWASAN TERPADU, SERTA PENYEDIAAN MEKANISME PENGADUAN YANG MUDAH DIAKSES, SEHINGGA PRAKTIK PERCALOAN DAPAT DICEGAH SECARA EFEKTIF.
- e. DIPERLUKAN PENGUATAN KEBIJAKAN BERBASIS CLUSTERING DENGAN MENGELOMPOKKAN KARAKTERISTIK PENGANGGURAN SEPERTI TRANSISI PEKERJAAN, MISMATCH KETERAMPILAN, FAKTOR EKONOMI/SEASONAL, DAN FAKTOR BUDAYA, SEHINGGA INTERVENSI YANG DILAKUKAN LEBIH TEPAT SASARAN DAN EFEKTIF.

7. ISU EKONOMI & DAYA BELI

- a. DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS HARGA, DIPERLUKAN PENGUATAN SISTEM PEMANTAUAN DAN PERINGATAN DINI TERHADAP KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK,

SEHINGGA INTERVENSI KEBIJAKAN DAPAT DILAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TERUKUR.

- b. DIPERLUKAN PENYELENGGARAAN INTERVENSI PASAR BERUPA PASAR MURAH, BAZAR PANGAN, DAN OPERASI PASAR SECARA TERENCANA DAN BERKELANJUTAN, DENGAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH, SEHINGGA MAMPU MENJAGA DAYA BELI MASYARAKAT PADA KONDISI TERTENTU.

8. ISU KETAHANAN PANGAN & PERTANIAN

- a. PELAKSANAAN PROGRAM PEMENUHAN GIZI MASYARAKAT, TERMASUK MELALUI PROGRAM NASIONAL MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG), PERLU DIDUKUNG DENGAN PENGUATAN RANTAI PASOK BERBASIS LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN, DAN PELAKU UMKM, SEHINGGA SELAIN MENINGKATKAN KUALITAS GIZI JUGA MEMBERIKAN DAMPAK EKONOMI DAERAH.
- b. DALAM MENGHADAPI DINAMIKA PERUBAHAN IKLIM, DIPERLUKAN PENGUATAN SISTEM IRIGASI DAN PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS, SEHINGGA KETAHANAN PANGAN DAERAH DAPAT TERJAGA.
- c. DIPERLUKAN EVALUASI DAN PENGUATAN PENGENDALIAN PENATAAN RUANG TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN SAWAH TERLINDUNGI YANG BERPOTENSI MENGALAMI ALIH FUNGSI TIDAK SESUAI PERUNTUKAN, MELALUI PENEGASAN KEBIJAKAN BERBASIS RTRW DAN LP2B, PENGUATAN PENGAWASAN LINTAS PERANGKAT DAERAH, SERTA PENERTIBAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG. SELAIN ITU, DIPERLUKAN SINERGI ANTARA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN MENCEGAH SEMAKIN MELUASNYA PENYIMPANGAN PEMANFAATAN RUANG.

9. ISU BANJIR & SUNGAI

- a. DIPERLUKAN PENANGANAN BANJIR SECARA KOMPREHENSIF MELALUI PENGELOLAAN SUNGAI BERBASIS TATA RUANG, NORMALISASI, SERTA KOORDINASI LINTAS WILAYAH, SEHINGGA RISIKO BANJIR DAPAT DIMINIMALISIR SECARA BERKELANJUTAN.
- b. PENANGANAN BANJIR DILAKUKAN MELALUI PENGUATAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN MELALUI KOLABORASI DENGAN PENGEMBANG DI WILAYAH TANGERANG RAYA,

GUNA MEMASTIKAN SISTEM DRAINASE DAN TATA AIR KAWASAN BERJALAN OPTIMAL SEHINGGA RISIKO BANJIR DAPAT DIMINIMALISIR.

10. ISU INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN (IPAL & SAMPAH)

- a. MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN IPAL MELALUI PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL OLEH BUMD, SEHINGGA SELAIN MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN JUGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH.
- b. PROGRAM PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPLT) DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL PERLU DIRENCANAKAN SECARA MATANG DAN JELAS PENGANGGARANNYA AGAR DAPAT BERJALAN OPTIMAL DALAM MENGURANGI DAMPAK NEGATIF DARI AIR LIMBAH DAN SAMPAH YANG TIDAK TEROLAH, SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGUATAN SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU.
- c. OPTIMALISASI POTENSI WADUK KARIAN DAN WADUK SINDANGHEULA SEBAGAI SISTEM PENYEDIA AIR MINUM (SPAM), YANG DIDUKUNG DENGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN MELALUI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ATAU SKEMA KELEMBAGAAN YANG SESUAI.

11. ISU TRANSPORTASI & KESELAMATAN

- a. DIPERLUKAN PENINGKATAN PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA RUAS STRATEGIS SERTA PENGUATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN, GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JALAN. SERTA DIDUKUNG DENGAN DENGAN PENYUSUNAN REGULASI DAERAH TERKAIT PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) AGAR PELAKSANAANNYA DAPAT TERARAH, TERENCANA, SESUAI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.
- b. UNTUK MENDORONG AKTIVITAS MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN TRANSPORTASI PUBLIK, PERLU DILAKUKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, PENINGKATAN KUALITAS HALTE UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS ANTAR MODA TRANSPORTASI YANG TERINTEGRASI.

12. ISU PAD & KEUANGAN DAERAH

- a. DENGAN REALISASI PAD YANG BELUM SEPENUHNYA OPTIMAL, DIPERLUKAN PENGUATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI DIGITALISASI LAYANAN DAN PENINGKATAN PENGAWASAN, INOVASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN TERMASUK UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENTIFIKASI DAERAH DENGAN MEMAKSIMALKAN PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), TERMASUK PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI SKEMA EKONOMI HIJAU SEPERTI PERDAGANGAN KARBON (*CARBON TRADING*) SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- b. DENGAN REALISASI BELANJA YANG TINGGI NAMUN BELANJA MODAL RELATIF LEBIH RENDAH, DIPERLUKAN PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN EFEKTIVITAS BELANJA AGAR LEBIH BERORIENTASI PADA HASIL DAN DAMPAK NYATA BAGI MASYARAKAT.
- c. PADA PENDAPATAN DAERAH, TANTANGAN KE DEPAN SEMAKIN BESAR SEIRING PERGESERAN KE KENDARAAN LISTRIK YANG BERPOTENSI MENURUNKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN, SEHINGGA PEMERINTAH DAERAH PERLU BERSIKAP PROAKTIF MELALUI OPTIMALISASI PENDATAAN WAJIB PAJAK YANG BELUM TERTAGIH, PENGUATAN SISTEM PENGINGAT PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS DIGITAL (WHATSAPP/SMS), SERTA PENYEDERHANAAN KANAL PEMBAYARAN MELALUI BERBAGAI PLATFORM DIGITAL. SELAIN ITU, DIPERLUKAN INOVASI DAN PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH GUNA MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL, TERMASUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH, PENGEMBANGAN SKEMA KERJA SAMA, SERTA PERAN AKTIF UPT PEMANPAATAN ASET PADA BPKAD DALAM MENGGALI SUMBER PENDAPATAN BARU, TERMASUK PENGELOLAAN ASET STRATEGIS SEPERTI SITU DI TANGERANG, DENGAN DIDUKUNG PENGINTEGRASIAN MANAJEMEN ASET SECARA MENYELURUH.

13. ISU PERENCANAAN & TATA KELOLA

- a. DIPERLUKAN PENGUATAN SINKRONISASI ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN KEBUTUHAN RIIL MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI MUSRENBANG SERTA INTEGRASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR, SEHINGGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENJADI LEBIH TEPAT SASARAN.

- b. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN) SEBAGAI BASIS DATA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH, GUNA MEMASTIKAN KETEPATAN SASARAN, PENINGKATAN EFEKTIVITAS INTERVENSI PROGRAM, SERTA PENGUATAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH MELALUI PENGELOLAAN DAN INTEGRASI DATA YANG TERPADU.

14. ISU ASN DAN TATA KELOLA

- a. PERLU DILAKUKAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA TERHADAP SELURUH ASN PROVINSI BANTEN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN, MEMOTIVASI, DAN MEMPERTAHANKAN KINERJA ASN BERPOTENSI TINGGI GUNA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI.
- b. MENDORONG SELURUH UNIT SAMSAT BAPENDA DAN SELURUH UNIT KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PREDIKAT ZONA INTEGRITAS DARI KEMENTERIAN PAN RB, GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERINTEGRITAS.

15. ISU EKONOMI KREATIF

DIPERLUKAN PENGUATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA, PENGUATAN PROMOSI DAN PEMASARAN SERTA DUKUNGAN FASILITASI DARI PEMERINTAH DAERAH, SEHINGGA POTENSI LOKAL DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SECARA BERKELANJUTAN.

16. ISU PENGELOLAAN PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PELABUHAN & PARIWISATA

- a. PENATAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL SECARA BERKELANJUTAN, MENDORONG PENGUATAN PERIZINAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DAN MENINGKATAN UPAYA KESELAMATAN WISATAWAN OLEH PETUGAS PENGAMANAN (LIFEGUARD), SEHINGGA POTENSI EKONOMI DAPAT DIRASAKAN MASYARAKAT.
- b. PENINGKATAN KONEKTIVITAS MENUJU KAWASAN WISATA MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PENERANGAN, SEHINGGA MAMPU MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL.

- c. DIPERLUKAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PENERANGAN JALAN PADA KAWASAN WISATA GUNA MENDUKUNG KEAMANAN, KENYAMANAN, DAN DAYA TARIK WISATA.
- d. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERLU MENDORONG PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN SECARA BERTAHAP MELALUI PENINGKATAN STATUS DAN KAPASITAS PELABUHAN, KHUSUSNYA PADA PELABUHAN CITUIS, BINUANGEUN, DAN PPP LABUAN, GUNA MENDUKUNG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT PESISIR SERTA MEMPERKUAT KONEKTIVITAS PERDAGANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL.
- e. PEMBERDAYAAN DAN PELIBATAN MASYARAKAT LOKAL DITINGKATKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN DESTINASI. PENGUATAN SINERGI LINTAS SEKTOR ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN KOMUNITAS DILAKUKAN SECARA BERKELANJUTAN. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA AGAR TERUS DILAKUKAN, MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PADA OBJEK WISATA RELIGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DAN KENYAMANAN PENGUNJUNG.
- f. UNTUK MENUJU PROGRAM BANTEN INDAH SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OPD PERLU DIARAHKAN AGAR MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH.

17. ISU PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEDERHANAAN PERATURAN DAERAH, SETIAP USULAN KEBIJAKAN PERLU MELALUI PROSES HARMONISASI, SINKRONISASI, DAN KAJIAN YANG MEMADAI, GUNA MENGHINDARI USULAN YANG TIDAK TERKOORDINASI SECARA TEPAT, SEHINGGA KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TIDAK BERHENTI PADA TATARAN NORMATIF, TETAPI DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN SECARA EFEKTIF SERTA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, TERMASUK DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT.

18. ISU KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA ANTARA LAIN DENGAN MENYUSUN KONSEP PROGRAM DAN KEGIATAN YANG

TEPAT, SERTA MEMPERSIAPKAN ATLET-ATLET SECARA TERENCANA DAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MENGHADAPI PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) YANG AKAN DISELENGGARKAN DI PROVINSI BANTEN, AGAR MAMPU MENGHASILKAN ATLET BERPRESTASI DAN BERDAYA SAING.

19. ISU ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, LINGKUNGAN, PEMANFAATAN AIR

- a. DIPERLUKAN PENGUATAN KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH, MELALUI PENATAAN PERIZINAN, PEMANTAUAN PENGGUNAAN, SERTA UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR, SEHINGGA KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN AIR DAPAT TERJAGA DAN RISIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN DAPAT DIMINIMALISIR.
- b. PERCEPATAN PENUNTASAN PROGRAM ELEKTRIFIKASI MELALUI KEGIATAN LISTRIK DESA YANG DILAKUKAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEMASTIKAN SELURUH MASYARAKAT MEMPEROLEH AKSES LISTRIK UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA BANTEN TERANG.
- c. DIPERLUKAN PENINGKATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS DISERTAI PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN, SEHINGGA KEBERLANJUTAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN TETAP TERJAGA.
- d. DIPERLUKAN PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN SERTA TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG MERUGIKAN, SERTA DILAKUKAN PENERTIBAN TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN, TERMASUK PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILEGAL).
- e. MENINGKATKAN PENGAWASAN PROYEK GALIAN TAMBANG DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH UNTUK MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN.
- f. MENDORONG PENGUATAN REHABILITASI LAHAN KRITIS MELALUI REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DI WILAYAH YANG MEMILIKI IJIN USAHA PERTAMBANGAN.

- g. TERDAPAT POTENSI PERTAMBANGAN PERLU ADANYA PERIZINAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU AGAR TIDAK ADA LAGI PENAMBANGAN LIAR.
- h. MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT DALAM UPAYA MEMINIMALISIR KERUSAKAN JALAN AKIBAT TRUK BERAT PEMBAWA HASIL TAMBANG.

20. ISU KEMANDIRIAN DESA DAN PROGRAM 1 DESA 1 SARJANA


TERHADAP BANTUAN KEUANGAN DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI, DPMD DIHARAPKAN MENYUSUN KEBIJAKAN AGAR ANGGARAN DESA MENDUKUNG PRIORITAS DAERAH DAN PENINGKATAN PERSENTASE DESA MANDIRI, DISERTAI OPTIMALISASI PROGRAM SATU DESA SATU SARJANA MELALUI EVALUASI MINAT MASYARAKAT SERTA KECUKUPAN ANGGARAN BANTUAN PENDIDIKAN, MENINGGAT DARI 1238 DESA BARU SEKITAR 400 SARJANA YANG TEREALISASI ATAU SEKITAR 6% YANG MELANJUTKAN KE JENJANG SARJANA, SERTA PENGUATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN DESA GUNA MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDIDIKAN DESA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PERDESAAN.

21. ISU PENCAPAIAN TARGET RENDAH DAN SANGAT RENDAH

TERHADAP INDIKATOR DAERAH YANG RENDAH DAN SANGAT RENDAH YAITU:

- a. PENYEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN
- b. PENYEDIAAN IPAL D YANG TERSAMBUNG
- c. LUAS LAHAN KRITIS YANG TEREHABILITASI
- d. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
- e. PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS
- f. PENINGKATAN PAJAK DAERAH

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FATMI HAKIM